

ANALISIS PENGELOUARAN PEMERINTAH TERHADAP PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN DI KOTA KOTAMOBAGU

Chelsia Paputungan¹, Agnes L. Ch. P. Lopian², George M. V. Kawung³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: chelsiarkp@gmail.com, agneslapian@unsrat.ac.id, georgekawung@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan alokasi anggaran untuk penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu dan untuk mengetahui proyeksi penganggaran pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Kotamobagu dan data penerima bantuan anggaran penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni selang tahun 2020 – 2022. Metode Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat antara anggaran rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan anggaran penyediaan Rumah Layak Huni terkena dampak relokasi program pemerintah dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang perumahan di Kota Kotamobagu, terdapat pengaruh signifikan positif baik anggaran rehabilitasi Rumah Layak Huni untuk korban bencana dan anggaran penyediaan Rumah Layak Huni untuk terkena dampak relokasi program pemerintah secara parsial maupun bersama-sama terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.

Kata Kunci : Standar Pelayanan Minimal, Penganggaran Pemerintah, Rumah Layak Huni

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between budget allocation for the provision and rehabilitation of Livable Homes for disaster victims and communities affected by government program relocation in meeting the minimum service standards in the public housing sector in Kotamobagu City and to determine the projections of local government budgeting in meeting the minimum service standards in the housing sector. people in Kotamobagu City. This study uses secondary data in the form of budget data for the Public Housing and Settlement Area Office of the City of Kotamobagu and data on recipients of budget assistance for the provision and rehabilitation of Livable Homes between 2020 – 2022. The analytical methods used in this study are correlation analysis and multiple linear regression analysis. The results of the study show that there is a very strong correlation between the budget for rehabilitation of Livable Homes for disaster victims and the budget for provision of Livable Homes affected by the relocation of the government program with the Minimum Service Standards for the housing sector in Kotamobagu City, there is a significant positive influence both the rehabilitation budget for Livable Homes for disaster victims and the budget for providing Livable Houses to be affected by the relocation of government programs partially or jointly against the Minimum Service Standards in the Housing Sector in Kotamobagu City.

Keywords:Minimum Service Standards, Government Budgeting, Livable Houses

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan pemerintah disaat pandemi COVID 19 yang melanda dunia di akhir tahun 2019 adalah refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan dampak C19. Terjadi realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa pada seluruh satuan kerja untuk keperluan penanganan pandemi. Pemerintah sebagai pelayan publik (Hilman, 2003) dalam perekonomian modern memiliki fungsi penting dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi yang berupaya mengatur, memperbaiki dan mengarahkan

aktivitas sektor swasta menuju masyarakat sejahtera. Fungsi dan peran pemerintah saat pandemi menjadi semakin besar untuk menjaga berbagai ketidakstabilan dan ketidakpastian ekonomi. Terutama dalam mengembalikan tingkat kesejahteraan masyarakat akibat kondisi pandemi. Disisi lainnya pemerintah harus mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib erat berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

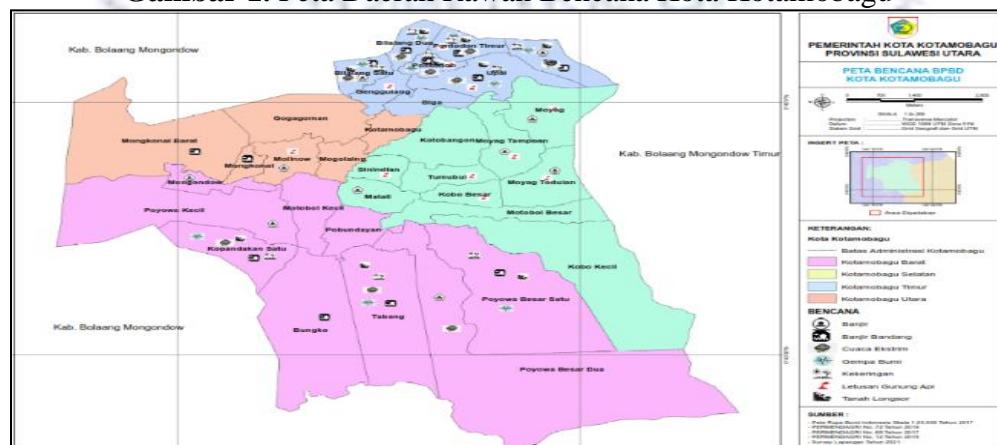
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005).

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari komponen konstruksi yang memiliki laju pertumbuhan 9,46 % di Kota Kotamobagu pada tahun 2021. Sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi pada tahun 2020 mencapai negatif 4,15%. Indikator utama SPM PUPR adalah rasio alokasi anggaran untuk pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena korban bencana dan relokasi program pemerintah terhadap pendapatan komponen konstruksi dalam PDRB.

Guna menunjang Visi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2019 – 2023 yaitu “**KOTA KOTAMOBAGU SEBAGAI KOTA JASA DAN PERDAGANGAN BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING**”, Kota Kotamobagu harus menyiapkan diri menjadi kota jasa dan pusat pertumbuhan ekonomi yang siap melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Oleh sebab, pemerintah harus memperbaiki akses infrastruktur, pelayanan perkotaan di permukiman kumuh perkotaan terseleksi dan rekonstruksi serta penguatan fasilitas publik dan pemukiman dilokasi berdampak bencana untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Kota Kotamobagu memiliki wilayah rawan bencana yang tersebar, terdapat kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh wilayah Kota Kotamobagu ; kawasan rawan gerakan tanah dan patahan di Kelurahan Molinow, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Sinindian, Kelurahan Tumobui, Kelurahan Kobo Besar dan Kelurahan Motoboi Besar, seluas + 628 ha ; Kawasan rawan longsor di Desa Moyag seluas ± 273 Ha; Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi Gunung Ambang di Desa Moyag dan Desa Moyag Todulan di Kecamatan Kotamobagu Timur seluas ± 322 Hektar; dan Kawasan rawan bencana banjir di Kelurahan Molinow, Mogolaing, Kotobangon, Matali, Kopandakan, Motoboi Kecil, Biga.

Gambar 1. Peta Daerah Rawan Bencana Kota Kotamobagu



Sumber : RTRW Kota Kotamobagu

Anggaran pemerintah yang terbatas terutama sejak adanya kebijakan refocusing membuat para pengambil kebijakan harus menetapkan prioritas penerima manfaat sehingga bias dari *policy targeting* se minimal mungkin. Termasuk pemenuhan SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu bisa lebih optimal. Pemerintah juga berupaya untuk menyediakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan menyediakan rumah yang layak huni baik melalui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas. Selang tahun 2013 - 2022 telah dilakukan pelayanan dasar penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota (data jumlah penerima bantuan permukiman).

Tabel 1. Alokasi Pengeluaran Pemerintah Bidang SPM Perumahan Kota Kotamobagu Tahun 2020-2022

TAHUN	ANGGARAN (Rp)
2013	32.825.000
2014	53.402.000
2015	147.550.000
2016	24.667.950
2017	41.093.950
2018	52.660.700
2019	49.159.800
2020	600.229.600
2021	497.429.300
2022	148.050.000

Sumber : Dinas PRKP Kota Kotamobagu

Selang tahun penelitian alokasi anggaran untuk memenuhi SPM terus berfluktuasi dan jumlahnya meningkat tajam di tahun 2020 saat pandemi. Fokus penelitian ini adalah alokasi anggaran untuk pembangunan rumah layak huni yang memenuhi standar pelayanan minimal bagi masyarakat korban bencana maupun yang rumahnya terkena relokasi program pemerintah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu?
2. Bagaimanakah hubungan alokasi anggaran untuk penyediaan RLH masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu?
3. Bagaimanakah proyeksi penganggaran pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.
2. Untuk mengetahui hubungan alokasi anggaran untuk penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.
3. Untuk mengetahui proyeksi penganggaran pemerintah daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.

Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan masukan penting bagi Pemerintah Kota Kotamobagu dalam menetapkan alokasi anggaran prioritas untuk memenuhi SPM pelayanan publik.
2. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti yang tertarik membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat.

Tinjauan Pustaka

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan melalui kebijakan ekonomi secara konsepsional juga melibatkan pertimbangan dari aspek sosial ekonomi yang secara transparan, adil dan memenuhi kaidah-kaidah perencanaan. Dalam aspek sosial ekonomi, yang perlu dipertimbangkan adalah pemenuhan standar hidup layak masyarakat serta keberadaan lembaga-lembaga sosial (*social capital*) yang fungsinya ditingkatkan. Hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil melintasi (menembus) batas ruang (*inter-region*) dan waktu (*inter-generation*) (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Menurut Deddy T. Tikson (2005) pembangunan nasional diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi.

Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004). Menurut Kuncoro (2004) pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan output yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional.

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan pengeluaran pemerintah (APBN) untuk nasional dengan Anggaran Pendapatan pengeluaran Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Guritno (1999), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah serta biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori Musgrave dan Rostow, Model pengeluaran pemerintah yang dihubungkan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah lebih pada mengatasi kegagalan pasar yaitu harus menyediakan barang dan jasa publik. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi terhadap masyarakat. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentasi investasi pemerintah dalam persentasi terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Teori Wagner, mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP. Wagner mengemukakan pendapatnya tentang pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP. Hukum Wagner adalah menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan

antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Sehingga peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Teori Peacock dan Wiseman, Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal merupakan tonggak dari usaha pemerintah dalam mendorong terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui perbaikan pelayanan kepada masyarakat dalam konteks pelayanan tingkat minimal yang wajib harus diterima oleh seluruh masyarakat, (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005).

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara, yang mencakup 1) Jenis Pelayanan Dasar; 2). Mutu Pelayanan Dasar; dan 3). Penerima Pelayanan Dasar. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29 Tahun 2018).

Penelitian Terdahulu

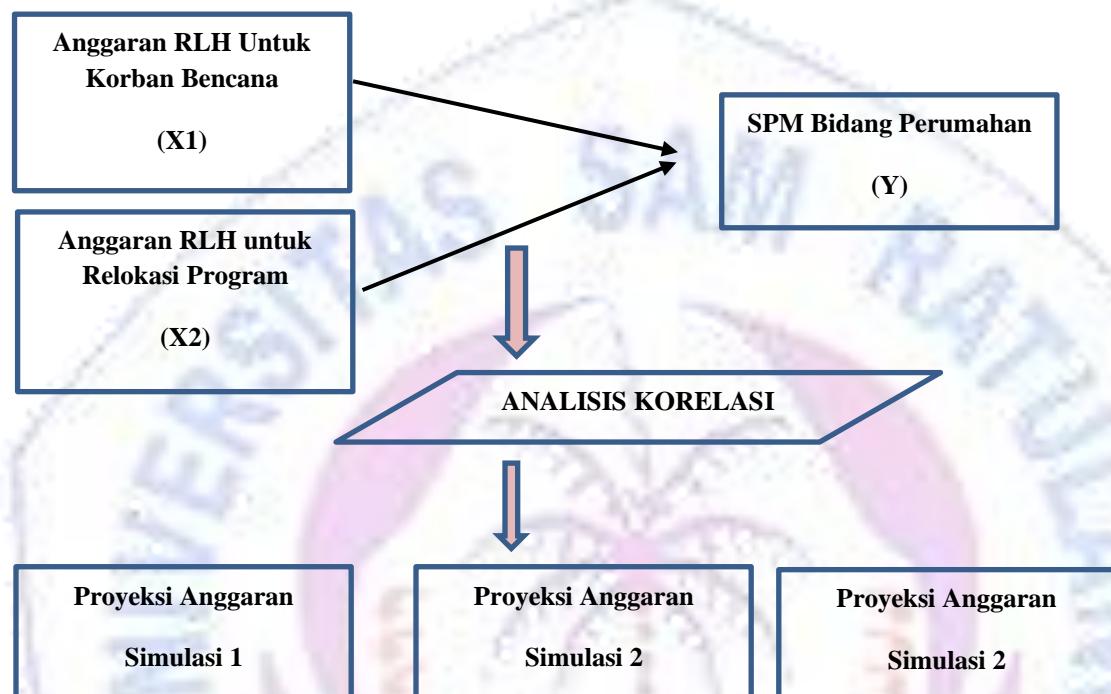
Penelitian dari Mandey dkk (2022) yang berjudul Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh signifikan pengeluaran pemerintah daerah atas infrastruktur, pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder pada tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dengan metode Ordinary Least Square. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis adalah EViews 11. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah atas Infrastruktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel pengeluaran pemerintah atas Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian Tamon Chindy dkk (2021) tentang Analisis Pola Pengeluaran Rutin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola anggaran pengembangan kinerja, sarana penunjang dan kesejahteraan di BPKPD. Menggunakan analisis ARIMA, diperoleh model terbaik adalah ARIMA (1 0,1), artinya anggaran bulan sebelumnya mempengaruhi alokasi anggaran bulan ini untuk pengembangan kinerja, sarana penunjang dan kesejahteraan di BPKPD Kabupaten Minahasa Tenggara.

Penelitian dari Nur Mintinia dkk (2019) yang berjudul Kajian Pemenuhan SPM Prasarana dan Sarana Permukiman di Kelurahan Cikawao. Daerah penelitian merupakan wilayah yang sering terjadi banjir. Tujuan penelitian ini sebagai upaya yang tepat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan untuk memenuhi standar pelayanan minimal guna terpenuhinya ketersediaan dan meningkatnya kualitas prasarana dan sarana

lingkungan yang sesuai dengan standar yang ada. Metode penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Dari hasil analisis yang dilakukan telah di dapatkan jenis prasarana dan sarana yang merupakan prioritas utama penanganan yaitu Prasarana Jaringan Drainase, Prasarana Jaringan Pemadam Kebakaran dan juga Sarana Ruang Terbuka Hijau, Taman dan Olahraga.

Kerangka Pikir



Hipotesis Penelitian

1. Diduga terdapat pengaruh pengeluaran Pemerintah yang signifikan terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu
2. Diduga terdapat pengaruh anggaran penyediaan dan rehabilitasi RLH bagi korban bencana serta masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder anggaran belanja pengeluaran pemerintah di Dinas PRKP Kota Kotamobagu selang tahun 2020 – 2022 serta data penerima bantuan anggaran penyediaan dan rehabilitasi RLH.

Metode Pengumpulan Data

1. Langsung mengambil data yang sudah tersedia di Dinas PRKP Kota Kotamobagu.
2. Melalui studi kepustakaan terutama menggali informasi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini.
3. Melalui wawancara mendalam terutama kepada para penerima manfaat program penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban banjir serta masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di Kota Kotamobagu.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Rehabilitasi RLH korban bencana adalah alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana di Kota Kotamobagu, diukur dalam rupiah.

2. Penyediaan RLH relokasi program adalah alokasi anggaran untuk penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah di Kota Kotamobagu, diukur dalam rupiah.
3. SPM adalah salah satu indikator kinerja Dinas PUPR yang menunjukkan rasio alokasi anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi sektor konstruksi, yang diukur dalam persen

$$SPM = \frac{\text{Anggaran Belanja Dinas PRKP}}{\text{Pertumbuhan Ekonomi Sektor Konstruksi}}$$

Metode Analisis

Analisis Korelasi

Analisis korelasi sederhana (Bivariate Correlation) digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Analisis ini akan menunjukkan hubungan antara anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH korban bencana dan korban relokasi program pemerintah terhadap pemenuhan SPM bidang perumahan. Kisaran korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1 dapat bernilai positif maupun negatif. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah, sebaliknya jika koefisien korelasi negatif artinya kedua variabel memiliki hubungan terbalik. Kekuatan hubungan variabel kriteriannya adalah sebagai berikut:

0 artinya tidak ada korelasi

0 – 0,25 artinya korelasi sangat lemah

0,25 – 0,5 artinya korelasi cukup

0,5 – 0,75 artinya korelasi kuat

0,75 – 0,99 artinya korelasi sangat kuat.

Model Persamaan Korelasi Pearson

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Analisis Regresi Berganda

Alat analisa yang dipakai untuk melakukan proyeksi anggaran penyediaan atau rehabilitasi RLH korban bencana dan relokasi program pemerintah adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yaitu mengestimasi garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut (Gujarati, 2012).

Model Persamaan

Persamaan matematis untuk model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Dimana:

Y = SPM Perumahan (Percentase Rasio Anggaran RLH dan PDRB ADHK Komponen Konstruksi)

X₁ = Anggaran rehabilitasi RLH korban bencana banjir

X₂ = Anggaran penyediaan RLH terkena dampak relokasi program pemerintah

Pengujian Hasil Persamaan Regresi

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H₀ ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H₀ diterima. Dalam analisis regresi terdapat tiga jenis kriteria ketetapan (godness of fit): (i) koefisien determinasi (ii) uji statistik F, dan (iii) uji statistik t.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan

satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji signifikan simultan (Uji statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau: $H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau: $H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$ Artinya semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Pyndick, 1998)

Uji signifikansi individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi-variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau: $H_0: b_i = 0$ Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatif parameter suatu variabel tidak sama dengan nol. $H_a: b_i \neq 0$ Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2013:244).

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik adalah dengan grafik histogram dan melihat normal probability plot yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Sedangkan uji statistik dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual.

Uji Multikolinearitas

Terjadinya multikolinieritas yang rawan pada model regresi bisa dideteksi keberadaannya bila R^2 dari auxilary regression melebihi R^2 regresi keseluruhan antara variabel tidak bebas dengan variabel bebas model yang diteliti. Selain itu jika nilai varian inflation faktor (VIF) > 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Jika suatu persamaan mengalami kondisi ketidakbebasan secara linier (dimana terdapat suatu baris/kolom yang merupakan kombinasi linier baris/kolom yang lain) maka sistem persamaan tersebut tidak akan memiliki solusi. Hal ini terjadi jika variabel bebas yang ada pada model mengalami multikolinieritas sempurna. Sedangkan jika multikolinieritas adalah tidak sempurna, maka kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi karena standar error yang bersifat Variabel (Gujarati, 2012).

Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi keberadaan heteroskedasitas digunakan metode grafik scatter plot, uji White, dimana apabila nilai probabilitas $n(p$ value) observasi R^2 lebih besar dibandingkan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), maka residual digolongkan homoskedasitas. Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan Ordinary Least Square (OLS) adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis. Jika tidak, disebut heterokedastis (Gujarati, 2012).

Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data time series walaupun dapat juga terjadi pada data cross section. Dalam data time series observasi diurutkan menurut urutan

waktu secara kronologis. Maka dari itu, besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antara dua observasi sangat pendek. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM test) dimana apabila probabilitas f hitung $> \alpha$ (5 %), maka bebas dari autokorelasi.

Simulasi Kebijakan Alokasi Anggaran

Selanjutnya untuk melakukan proyeksi anggaran pemerintah untuk penyediaan dan rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil analisis korelasi dan menyusun 3 (tiga) simulasi proyeksi anggaran. Simulasi proyeksi anggaran merupakan persentase alokasi anggaran yang akan direncanakan pada tahun berikutnya.

Simulasi I, Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH berdasarkan seluruh potensi rumah yang harus ditangani Dinas PUPR untuk memenuhi SPM bidang perumahan.

Simulasi II, Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil korelasi antara kedua alokasi anggaran (korban bencana dan relokasi program pemerintah) terhadap SPM bidang perumahan.

Simulasi III, Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil proyeksi alokasi anggaran (korban bencana dan relokasi program pemerintah) terhadap SPM bidang perumahan menurut model regresi linier berganda.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Korelasi

Dalam penelitian ini, analisa korelasi digunakan untuk menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) bagi korban banjir (X_1) serta penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah (X_2) dengan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat (Y) di Kota Kotamobagu.

Tabel 2. Hasil Analisis Korelasi

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 11/27/22 Time: 18:58

Sample: 1 10

Included observations: 10

Correlation	Y	X1	X2
Y	1.000000		
X1	0.857717	1.000000	
X2	0.765735	0.347805	1.000000

Sumber : Hasil olahan data melalui Eviews

Berdasarkan hasil tersebut terdapat hubungan positif antar variabel, artinya antar variabel memiliki hubungan searah (peningkatan terhadap X_1 juga meningkatkan Y begitu juga dengan X_2 yang meningkat membuat Y juga meningkat, bahkan peningkatan X_1 juga meningkatkan X_2).

Jika dilihat dari koefisien korelasi ternyata :

1. Hubungan antara Y dan X_1 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,85 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat antara Y dan X_1 .
2. Hubungan antara Y dan X_2 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 artinya terdapat korelasi yang sangat kuat antara Y dan X_2 .
3. Hubungan antara X_1 dan X_2 memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,35 artinya terdapat korelasi cukup antara X_1 dan X_2 .

Hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan korelasi yang sangat paling kuat tampak pada anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH bagi mereka yang korban bencana dengan pemenuhan SPM bidang perumahan. Indikator SPM bidang perumahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan persentase rasio dari total anggaran (X_1 dan X_2) terhadap nilai komponen konstruksi pada PDRB ADHK Kota Kotamobagu.

Analisis Regresi Berganda

Selanjutnya digunakan pendekatan analisis regresi untuk melihat korelasi kedua variabel bebas (X_1 dan X_2) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hasil olah data menggunakan eviews yang tampak pada tabel berikut ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R^2) menunjukkan angka 0,98 artinya terdapat hubungan korelasi sangat kuat antara anggaran rehabilitasi RLH untuk rumah korban bencana dan penyediaan RLH yang terkena relokasi program pemerintah dengan SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu.

Tabel 3. Hasil Regresi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 11/27/22 Time: 11:34
 Sample: 1 10
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.685154	2.569841	1.434001	0.1947
X1	2.76E-10	2.08E-11	13.28666	0.0000
X2	3.32E-10	3.16E-11	10.50135	0.0000
R-squared	0.984223	Mean dependent var	43.87558	
Adjusted R-squared	0.979716	S.D. dependent var	37.35615	
S.E. of regression	5.320349	Akaike info criterion	6.424280	
Sum squared resid	198.1428	Schwarz criterion	6.515056	
Log likelihood	-29.12140	Hannan-Quinn criter.	6.324700	
F-statistic	218.3484	Durbin-Watson stat	1.318327	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Jika dianalisis lanjut ternyata hubungan korelasi antara X_1 dan X_2 terhadap Y juga memiliki pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun secara bersama-sama. Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil olahan data eviews :

$$Y = 3,6851 + 2,76 \times 10^{-10} X_1 + 3,32 \times 10^{-10} X_2 + e$$

Koefisien Determinasi

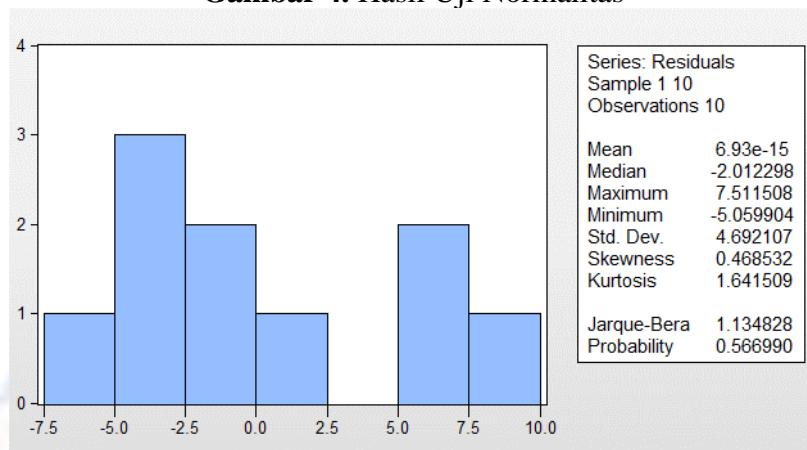
Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi ($Adj. R^2$) sebesar 0.9797 atau 97,97%. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan anggaran/ belanja pemerintah untuk rehabilitasi RLH untuk korban bencana (X_1) maupun penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah (X_2) secara bersama – sama memiliki pengaruh 97,97 % terhadap variasi perubahan SPM Bidang perumahan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan data diperoleh Prob (F-statistik) 0,0000 atau. Signifikan pada $\alpha = 0.01$. Yang artinya semua variabel bebas (X_1, X_2) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda menunjukkan adanya tingkat signifikansi variabel pengeluaran pemerintah untuk rehabilitasi RLH bagi korban bencana dan penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah terhadap SPM Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas****Gambar 4.** Hasil Uji Normalitas*Sumber : Hasil olah data Eviews*

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera (1,134828) $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas**Tabel 5.** Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 12/06/22 Time: 23:19

Sample: 1 10

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6.604083	2.333094	NA
X2	1.00E-21	2.242609	1.137615
X1	4.33E-22	2.072860	1.137615

Sumber : Hasil olah data Eviews 12

Untuk melihat apakah model mengalami multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, inflation faktor (VIF) pada X_1 dan $X_2 < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 6.** Uji White

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.523441	Prob. F(2,7)	0.6140
Obs*R-squared	1.300978	Prob. Chi-Square(2)	0.5218
Scaled explained SS	0.204474	Prob. Chi-Square(2)	0.9028

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji white menggunakan Eviews 12 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi R^2 sebesar 0,5218 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5 \%$), $0,5218 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: Y
 Method: Least Squares
 Date: 11/27/22 Time: 11:34
 Sample: 1 10
 Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.685154	2.569841	1.434001	0.1947
X1	2.76E-10	2.08E-11	13.28666	0.0000
X2	3.32E-10	3.16E-11	10.50135	0.0000
R-squared	0.984223	Mean dependent var	43.87558	
Adjusted R-squared	0.979716	S.D. dependent var	37.35615	
S.E. of regression	5.320349	Akaike info criterion	6.424280	
Sum squared resid	198.1428	Schwarz criterion	6.515056	
Log likelihood	-29.12140	Hannan-Quinn criter.	6.324700	
F-statistic	218.3484	Durbin-Watson stat	1.318327	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil olah data Eviews

Dari hasil uji dapat dilihat nilai Durbin Watson Statistik adalah 1,31837 artinya tidak ada masalah autokorelasi.

Simulasi Kebijakan Alokasi Anggaran

Untuk melakukan proyeksi anggaran pemerintah untuk penyediaan dan rehabilitasi RLH didasarkan pada hasil analisis korelasi dan menyusun 3 (tiga) simulasi proyeksi anggaran. Simulasi proyeksi anggaran merupakan persentase alokasi anggaran yang akan direncanakan pada tahun berikutnya.

Tabel 8. Rekapitulasi Hasil Olahan Data

Variabel	Analisis 1 Koef. Korelasi	Analisis 2 Koef. Korelasi	Analisis 2 Koef. Regresi
X ₁	0,8577	0,9842	2,76E-10
X ₂	0,7657	0,9842	3,32E-10

Sumber: Hasil Olahan

Hasil analisa 1 menunjukkan hubungan korelasi yang sangat kuat untuk X₁ lebih tinggi dibandingkan dengan X₂. Hasil analisa 2 menunjukkan terdapat perbedaan pada besarnya pengaruh X₁ dan X₂ terhadap Y, dimana koefisien regresi menunjukkan bahwa pengaruh positif X₂ lebih besar dibandingkan pengaruh X₁ terhadap Y.

Data rumah yang harus ditangani pemerintah untuk potensi bencana kekeringan, gempa, cuaca ekstrim dan gunung berapi sulit untuk diprediksi, yang rumah target korban bencana lebih ke korban longsor (46 rumah) dan banjir (156 rumah) atau total 202 rumah yang terletak di 18 kelurahan/desa. Korban Potensi bencana terbesar di Kelurahan Gogagoman diikuti Kelurahan Kotobangon dan Desa Bilalang I.

Tabel 9. Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran RLH

Variabel	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
X ₁	202	7.227.500.000	18 Kel/desa
X ₂	12	1.080.000.000	2 Kel/desa
X ₁ & X ₂	214	8.307.500.000	18 Kel/desa

Sumber: Hasil Olahan

Sedangkan data penyediaan/rehabilitasi RLH untuk relokasi program pemerintah terdapat 12 unit rumah yang terletak di Desa Pontodon Timur dan Kelurahan Upai.

Berdasarkan hasil tersebut proyeksi anggaran RLH untuk pemenuhan SPM Bidang perumahan adalah sebagai berikut :

Simulasi I : Anggaran penyediaan/rehabilitasi RLH berdasarkan seluruh potensi rumah yang harus ditangani Dinas PUPR untuk memenuhi SPM bidang perumahan. Sesuai dengan tabel 9, maka besarnya anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kota Kotamobagu untuk penyediaan/rehabilitasi RLH untuk korban bencana dan relokasi program adalah Rp 8.307.500.000. Tentunya pemenuhan keseluruhan rumah program penyediaan/rehabilitasi RLH yang menjadi tanggung jawab pemerintah menjamin pemenuhan SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu.

Simulasi II : Berdasarkan koefisien korelasi ditetapkan bahwa anggaran rehabilitasi RLH untuk korban bencana (X_1) memiliki proporsi lebih besar dibandingkan dengan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah (X_2). Dengan simulasi proyeksi anggaran adalah :

Tabel 10. Simulasi Proyeksi Anggaran Versi I

Variabel	Koefisien Korelasi	Proporsi (%)
X_1	0,8577	52,83
X_2	0,7657	47,17
Total	1,6234	100,00

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan hasil simulasi diatas maka proyeksi anggaran untuk :

- Rehabilitasi RLH untuk korban bencana adalah 52,83 % dari total anggaran X_1 7.227.500.000 rupiah, yaitu sebesar 3.818.288.250 rupiah.
- Penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah adalah 47,17 % dari total anggaran X_2 1.080.000.000 rupiah, yaitu sebesar 509.436.000.
- Besarnya proyeksi anggaran rehabilitasi/penyediaan RLH di tahun berikutnya adalah 4.327.724.250 rupiah atau sebesar 52,09 % dari total anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kota Kotamobagu.

Simulasi III : Anggaran rehabilitasi RLH memiliki proporsi lebih besar dibandingkan dengan anggaran penyediaan RLH.

Tabel 11. Simulasi Proyeksi Anggaran Versi II

Variabel	Koefisien Regresi	Proporsi (%)
X_1	2,76 E-10	45,39
X_2	3,32 E-10	54,61
Total	6,08 E-10	100,00

Sumber: Hasil Olahan

Berdasarkan hasil simulasi diatas maka proyeksi anggaran untuk :

- Rehabilitasi RLH untuk korban bencana adalah 45,39 % dari total anggaran X_1 7.227.500.000 rupiah, yaitu sebesar 3.280.562.250 rupiah.
- Penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah adalah 54,61 % dari total anggaran X_2 1.080.000.000 rupiah, yaitu sebesar 589.788.000.
- Besarnya proyeksi anggaran rehabilitasi/penyediaan RLH di tahun berikutnya adalah 3.870.350.250 rupiah atau sebesar 46,59 % dari total anggaran yang harus disiapkan pemerintah Kota Kotamobagu.

Pembahasan

Pemerintah Kota Kotamobagu dalam pemenuhan SPM bidang perumahan memiliki hubungan korelasi yang kuat dengan keputusan alokasi anggaran belanja untuk penyediaan dan

rehabilitasi RLH. Keterbatasan anggaran memerlukan kajian empirik atas keputusan alokasi anggaran pada kedua program pemerintah tersebut.

Besarnya anggaran untuk pemenuhan SPM bidang perumahan dari program rehabilitasi RLH untuk korban bencana dan penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah berdasarkan simulasi sebelumnya menunjukkan bahwa proyeksi terbaik adalah menggunakan simulasi ketiga, karena memiliki koefisien korelasi terbesar dengan hubungan korelasi sangat kuat.

Distribusi alokasi anggaran pemerintah daerah di tahun berikutnya jika tidak bisa memenuhi keseluruhan kewajiban daerah yaitu sebesar 8,3 miliar rupiah untuk penyediaan/rehabilitasi RLH, bisa melakukan simulasi kedua yang alokasi anggarannya hanya 4,3 miliar rupiah atau simulasi ketiga yang jumlahnya hanya 3,87 miliar rupiah.

Hasil penelitian menunjukkan alokasi anggaran simulasi ketiga yang paling efektif ternyata menunjukkan alokasi anggaran paling minimal dalam memenuhi SPM bidang perumahan di Kota Kotamobagu.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat hubungan korelasi yang sangat kuat antara anggaran rehabilitasi RLH korban bencana dan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah dengan SPM Bidang perumahan di Kota Kotamobagu.
2. Terdapat pengaruh signifikan positif baik anggaran rehabilitasi RLH untuk korban bencana dan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah secara parsial maupun bersama-sama terhadap SPM Bidang Perumahan di Kota Kotamobagu.
3. Distribusi alokasi anggaran berdasarkan simulasi I yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah alokasi anggaran untuk rehabilitasi RLH untuk korban bencana (7,2 miliar rupiah) lebih besar dibandingkan dengan anggaran penyediaan RLH untuk relokasi program pemerintah (1,1 miliar rupiah) dalam memenuhi SPM bidang perumahan, dengan total anggaran RLH sebesar 8,3 miliar rupiah
4. Distribusi alokasi anggaran berdasarkan simulasi II dan simulasi III yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah anggaran RLH simulasi II (4,3 miliar rupiah) lebih besar dibandingkan dengan anggaran RLH simulasi III (3,87 miliar rupiah) dalam memenuhi SPM bidang perumahan.

Saran

1. Pemerintah daerah Kota Kotamobagu harus tetap memenuhi SPM bidang perumahan karena merupakan urusan wajib pemerintahan dan merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pemerintah daerah.
2. Pemerintah daerah juga bisa mempertimbangkan target rumah yang menjadi tujuan program jika ternyata merupakan masyarakat miskin dan jika korban bencana atau relokasi program menyebabkan masyarakat tersebut jadi berkurang kesejahteraannya dan menjadi miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Hillman Arye L, 2003**, Public Finance and Public Policy: Responsibilities and limitations of government. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004**, Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Cetakan 1, Jakarta : LP3ES.
- Deddy T. Tikson, 2005**, Indikator-indikator Pembangunan Ekonomi. <http://ecozon.html>.
- Kuncoro, Mudrajad, 2004**, Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sukirno S, 2000**, Ekonomi Pembangunan, LPEF-UI Bima Grafika, Jakarta
- Guritno M, 1999**, Ekonomi Publik, Ed.3, Cet.7. Jakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Mandey A, Rotinsulu D & Walewangko E, 2022**, Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Atas Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol 22 No.2
- Tamon C, Walewangko E & Lapian A, 2021**, Analisis Pola Pengeluaran Rutin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol 22, No 4.
- Nur Muntinia M.D dan Ernawati H, 2019**, Kajian Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Prasarana dan Sarana Permukiman di Kelurahan Cikawao, Prosiding Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.5. No.1, ISSN 2460-6480.
- Gujarati Damodar N dan Dawn C Porter, 2012**, Dasar – Dasar Ekonometrika. Salemba Empat, Jakarta.

